

Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam Upaya Mengurangi Angka *Stunting* Pada Balita

Erna Widyawati, Sudaryanti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

email: ernawidyawati049@student.uns.ac.id

Sudaryanti26@gmail.com

Abstrak

Permasalahan angka *stunting* di Kabupaten Sragen dirasa masih tinggi, dari data BPS Kemenkes, Integrasi Susenas Maret 2019 dan SGBI Tahun 2019 jika dibandingkan dengan kabupaten se-eks karesidenan Surakarta lainnya, dapat dikatakan bahwasannya Kabupaten Sragen memiliki angka *stunting* paling tinggi yakni sekitar 32,40%. Dari permasalahan tersebut tentu diperlukan penanganan secara komprehensif serta terpadu oleh unsur pemerintah melalui badan yang terkait dan memiliki serta berwenang dalam sektor kesehatan masyarakat diantaranya yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam upaya mengurangi angka *stunting* pada balita. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif kualitatif, serta data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel bersifat *purposive sampling*. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode/teknik. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam Upaya Mengurangi Angka Stunting pada Balita sudah cukup responsive untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, memiliki kegiatan prioritas yang telah disusun serta mampu mengembangkan program pelayanan seperti berinovasi dan bekerjasama dengan lintas sektor.

Kata kunci : Responsivitas; *Stunting*; Balita

Abstract

The problem of the stunting rate in Sragen Regency is still considered high, from data from the Ministry of Health BPS, the March 2019 Susenas Integration and the 2019 SGBI when compared to other districts in the former Surakarta residency, it can be said that Sragen Regency has the highest stunting rate, which is around 32.40%. . From these problems, of course, a comprehensive and integrated handling is needed by government elements through related agencies and has and is authorized in the public health sector, including the Sragen District Health Office. This study aims to determine and describe how the Responsiveness of the Sragen District Health Office in an effort to reduce stunting rates in toddlers. This study uses a type of research with qualitative descriptive methods, and the data used consists of primary and secondary data, obtained from interviews, observations and documentation. The sampling technique is purposive sampling. The validity of the data using triangulation of sources and methods/techniques. Furthermore, the data analysis

technique was carried out using the Miles and Huberman interactive analysis model. The results showed that the responsiveness of the Sragen District Health Office in Efforts to Reduce Stunting Rates in Toddlers was responsive enough to know the needs of the community, had priority activities that had been prepared and was able to develop service programs such as innovating and collaborating with cross-sectors.

Keywords: Responsiveness; Stunting; Toddler

Pendahuluan

Salah satu yang menjadi aspek indikator ketercapaian atau keberhasilan kesehatan dalam target SDGs (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia diantaranya terkait gizi pada balita (Kementerian PPN/Bappenas 2020:40). Dilansir dari kemenpppa.go.id di Indonesia saat ini mengalami permasalahan tentang kekurangan gizi pada balita, sebab balita sendiri yaitu termasuk ke dalam kelompok yang rentan terkena kekurangan gizi diantaranya yaitu *stunting*. *Stunting* merupakan permasalahan kekurangan asupan gizi pada balita dengan waktu yang cukup lama, hal tersebut ditandai dengan adanya perbedaan tinggi badan dimana balita yang mengalami *stunting* akan lebih pendek/ kerdil jika dibandingkan dengan balita seusianya. Menurut Budi Setiawan(2018:4) balita yang mengalami *stunting* nantinya akan lebih rentan dan beresiko terhadap penyakit hal ini dikarenakan sistem imunitas mereka yang lebih rendah sehingga akan beresiko mengidap penyakit di masa mendatang. Tidak hanya berpengaruh pada aspek kesehatan, dengan adanya *stunting* nantinya juga berpengaruh terhadap tingkat gangguan otak dan tidak maksimalnya kecerdasan pada balita. Sehingga pada umumnya dapat menghambat produktivitas yang nantinya akan berdampak pada rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Menurut Informasi dari web kemenkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) yang dimuat dalam survei status gizi balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa angka *stunting* di Indonesia tahun 2019 masih cukup tinggi, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah sebesar 27,68% yang artinya lebih tinggi dari tren angka *stunting* nasional serta dikatakan belum mampu memenuhi target *stunting* WHO yakni kurang dari 20%. Adapun di Provinsi Jawa Tengah terdapat salah satu kabupaten yang mempunyai masalah terkait dengan *stunting* yakni di Kabupaten Sragen. Menurut data dari BPS Kemenkes, Integrasi Susenas Maret 2019 dan SSGBI Tahun 2019 jika dibandingkan Kabupaten Se-eks Karesidenan Surakarta lainnya, dapat dikatakan bahwasannya Kabupaten Sragen memiliki angka *stunting* paling tinggi yakni sekitar 32,40%. Hal tersebut tentu menjadikan Kabupaten Sragen menjadi salah satu wilayah yang masuk kedalam 100 Kabupaten/Kota sebagai wilayah prioritas pencegahan stunting pada tahun 2020, selaras dengan hal tersebut menjadikan pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 30 tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Sragen. Dalam

peraturan tersebut secara garis besar dijelaskan terkait tujuan dari percepatan pencegahan *stunting* yakni menurunkan prevalensi *stunting* pada anak balita di Kabupaten Sragen hingga di bawah 20% pada tahun 2024, dimana untuk mewujudkan hal tersebut dapat melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah diantaranya Dinas Kesehatan yang memiliki tugas utama dan kewenangan di sektor kesehatan serta memegang peranan penting dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Sragen utamanya terkait dengan berbagai intervensi gizi spesifik dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta monitoring/evaluasi. Mengingat fenomena tingginya angka *stunting* di Kabupaten Sragen tentu dibutuhkan perhatian dari pemerintah, khususnya pihak Dinas Kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dibutuhkan sikap ketegasan petugas Dinas Kesehatan dalam pemenuhan pelayanan yang didasarkan pada aturan yang berlaku. Sikap tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat dan menjadi salah satu bentuk daya tanggap (responsivitas) Dinas Kesehatan dalam mengatasi masalah *stunting* yang ada. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik ingin membahas secara lebih mendalam dengan penelitian di wilayah Kabupaten Sragen mengenai Bagaimana Responsivitas Dinas Kabupaten Sragen dalam Upaya Mengurangi Angka *Stunting* Pada Balita?

Good governance merupakan penyelenggara tata kelola pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan korupsi baik dalam aspek politik maupun administrasi, penghindaran adanya kesalahan alokasi dana investasi, sehingga tercipta disiplin anggaran dan penciptaan legal ataupun *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Sutiono, 2011:22). Adapun menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam (Yousaf, 2015:2) salah satu prinsip yang ada di dalam *good governance* yakni *responsiveness*. *Responsiveness* menggambarkan pemerintah atau lembaga berusaha untuk melayani seluruh masyarakat dalam frekuensi waktu yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengoreksi kesalahan mereka serta mampu untuk menanggapi masalah dan keluhan masyarakat sehingga nantinya dapat mencapai tata kelola pemerintah yang baik atas keinginan dan persepsi masyarakat. Selanjutnya, menurut Fitsum Weldu Abrha (2016:5) responsivitas menyiratkan tentang bagaimana negara serta lembaga publik lainnya tampil dalam menanggapi kebutuhan serta hak warga terkait bagaimana dalam menyediakan layanan, perlakuan terhadap masyarakat, serta kebutuhan yang diinginkan dipenuhi dan diprioritaskan atau tidak. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah dapat melakukan hal yang benar bagi masyarakat dan layanan yang nantinya akan diberikan harus sesuai dengan keinginan serta kebutuhan warga negara.

Banyaknya berbagai sudut pandang dari aspek responsivitas dalam pelayanan publik tentunya merujuk pada kesimpulan yakni memiliki unsur komunikasi pemerintah dengan masyarakat, adanya upaya pemecah masalah, adanya penilaian dari masyarakat tentang sikap para aparat, serta adanya unsur kebutuhan dari masyarakat dimana dari hal itu responsivitas dirasa sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Adapun responsivitas dalam penelitian ini dianalisis dengan merujuk pada 3 indikator menurut Agus Dwiyanto, yaitu :

- a. Kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan masyarakat
Dalam indikator ini dapat dilihat dari adanya komunikasi yang baik antara masyarakat kritik dan saran dari masyarakat akan membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen untuk lebih responsive dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Dengan demikian untuk mengetahui kebutuhan masyarakat diperlukan adanya komunikasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dengan masyarakat secara langsung agar memperoleh informasi dan data mengenai masalah yang ditemukan di masyarakat
- b. Kemampuan birokrasi menyusun agenda dan prioritas pelayanan
Menunjukkan adanya kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat dengan adanya informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai acuan untuk menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kondisi/ masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- c. Kemampuan untuk mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Menunjukkan adanya kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat maka informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan program yang dibuat dan pelayanan yang diberikan akan tepat sasaran. Sehingga masyarakat akan merasa puas dan merasa diperhatikan jika program yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan yakni teknik *purposive sampling* dimana penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yakni pada informan yang dirasa paling mengerti terkait hal apa yang diinginkan oleh peneliti. Sehingga nantinya akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, data primer berasal dari data lapangan yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti yakni melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa literatur baik secara online maupun offline.

Selanjutnya, validitas data yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber dan metode. Dimana dalam triangulasi sumber, peneliti berupaya untuk memeriksa dan membandingkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sumber yang berbeda yakni Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen; Nutritionist Gizi UPTD Puskesmas Masaran, Bidan Desa Kedawung Mondokan; Bidan Desa Jirapan Masaran serta Ibu yang memiliki anak *stunting*. Sedangkan, triangulasi teknik/metode menunjuk pada upaya peneliti dalam mengumpulkan data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga nantinya peneliti dapat membandingkan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dengan hasil dokumentasi untuk menguji apakah data yang didapatkan valid atau tidak. Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam Upaya Mengurangi Angka Stunting Pada Balita adalah model interaktif miles dan huberman (1984 dalam Sugiyono 2016:246) yang mencakup tiga langkah analisis data yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan angka *stunting* di Kabupaten Sragen dirasa masih tinggi, dari data BPS Kemenkes, Integrasi Susenas Maret 2019 dan SGBI Tahun 2019 jika dibandingkan dengan kabupaten se-eks karesidenan Surakarta lainnya, dapat dikatakan bahwasannya Kabupaten Sragen memiliki angka *stunting* paling tinggi yakni sekitar 32,40%. Mengingat fenomena tingginya angka *stunting* pada balita di Kabupaten Sragen diperlukan penanganan secara komprehensif serta terpadu oleh unsur pemerintah melalui badan yang terkait dan memiliki serta berwenang dalam sektor kesehatan masyarakat diantaranya yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, dimana dalam menjalankan kewajibannya Dinas Kesehatan diharapkan mampu bergerak di bidang kesehatan khususnya dalam mengatasi angka *stunting* pada balita.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan daya tanggap/ responsivitas dari Dinas Kesehatan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat. Dalam melihat responsivitas Dinas Kesehatan, maka digunakan indikator responsivitas oleh Agus Dwiyanto (2006:62) yang terdiri dari kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan masyarakat, kemampuan birokrasi menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta kemampuan birokrasi dalam mengembangkan program pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut penjelasannya :

1. Kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan masyarakat untuk mengurangi stunting pada balita

Kemampuan birokrasi guna mengenali kebutuhan masyarakat merupakan upaya terkait bagaimana dinas kesehatan Kabupaten Sragen dalam mengenali

apa saja yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi atau bahkan sebagai langkah pencegahan stunting pada balita. Dalam upaya tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menjadi *leading sector* atau penggerak serta sebagai fasilitator atau penyedia fasilitas pelayanan kesehatan khususnya intervensi gizi spesifik pada balita. Dimana dalam hal ini Dinas Kesehatan bekerjasama dengan kader kesehatan, PKK, Posyandu, pemangku desa, serta puskesmas yang ada di Kabupaten Sragen yang bertugas untuk menjalankan semua program/kegiatan yang disusun oleh Dinas Kesehatan. Dalam aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat guna menangani balita stunting bukan hal mudah, hal ini dikarenakan beberapa faktor penyebab stunting yang mungkin berbeda tiap satu balita dengan balita lainnya seperti faktor rendahnya pendidikan orang tua ataupun ekonomi. Sehingga hal tersebut menjadikan Dinas Kesehatan bersama sektor kesehatan lainnya perlu untuk mengidentifikasi lebih mendalam terkait jenis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun cara yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan tersebut diantaranya melalui

- a) SMD (Survey Mawas Diri) merupakan kegiatan yang dilaksanakan di awal tahun guna membahas permasalahan kesehatan yang terjadi di desa beserta faktor penyebabnya. Yang dihadiri oleh perwakilan kader tiap RT, bidan desa yang didampingi oleh petugas kesehatan dari puskesmas.
- b) Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) merupakan kegiatan lanjutan dari SMD, dimana dihadiri oleh forum kesehatan desa yang terdiri dari lurah, bayan, RT\RW, kader kesehatan yang didampingi oleh petugas kesehatan baik dari puskesmas ataupun dinas kesehatan untuk membahas jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Adapun jenis kebutuhan masyarakat guna menangani permasalahan stunting terdiri dari beberapa jenis kebutuhan, diantaranya yaitu

- a) Kebutuhan edukasi
Dinas Kesehatan bersama dengan kader kesehatan, posyandu serta puskesmas berupaya memberikan edukasi atau pengetahuan tentang stunting itu melalui berbagai kegiatan diantaranya melalui Sosialisasi, Kelas Remaja, Kelas Calon Pengantin, Kelas Ibu Hamil, serta Kelas Ibu Balita. Dimana dalam hal ini Dinas Kesehatan memberikan program tersebut yang kemudian dijalankan secara langsung ke masyarakat oleh pihak kader bersama posyandu dan puskesmas.
- b) Kebutuhan pemulihan pangan dan gizi
merupakan kebutuhan yang ditujukan kepada masyarakat dimulai dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita Di kabupaten Sragen. Hal ini merupakan upaya pengentasan stunting dalam aspek intervensi gizi spesifik atau intervensi yang ditujukan kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 hari

pertama kehidupan yang dicanangkan oleh dinas kesehatan yang bekerjasama dengan kader kesehatan, PKK, posyandu, puskesmas, ataupun pihak desa dimana didalamnya terdapat kesepakatan dan dorongan agar ada anggaran penggunaan dana desa juga untuk percepatan pencegahan stunting pada balita. Pemulihan pangan dan gizi ini dimaksudkan untuk membantu mencukupi kebutuhan baik bagi remaja dan ibu hamil yang sering mengalami anemia, serta mencukupi kebutuhan gizi pada balita agar tidak semakin memburuk status gizinya.

c) Kebutuhan pemeriksaan kesehatan

Pemeriksaan kesehatan merupakan langkah Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan lain yang dalam hal ini yakni posyandu, puskesmas dan rumah sakit rujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil ataupun balita. Melalui pemeriksaan kesehatan inilah nantinya petugas kesehatan mengetahui ibu hamil ataupun balita mengalami kekurangan gizi yang serius serius atau tidak sehingga nanti apabila terindikasi terdapat kekurangan gizi ataupun disertai penyakit lainnya, petugas kesehatan dapat mengambil penanganan yang lebih lanjut terhadap kondisi ibu hamil ataupun balita tersebut.

d) Kebutuhan konseling dan pendampingan

merupakan penyampaian informasi dari dua arah terkait masalah kesehatan utamanya mengenai gizi, dimana dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Sragen terlebih lagi bagi ibu hamil ataupun ibu balita bisa ikut aktif berpartisipasi untuk berdiskusi dengan konselor tentang kesehatan dan gizi. Adapun tujuan dari adanya konseling/pendampingan ini yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan kesehatan gizi serta memberikan pendampingan dan arahan alternatif pemecah masalah gizi kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat mampu menentukan sikap dan keputusan untuk mengatasi masalah gizi yang dialami

2. Kemampuan birokrasi menyusun agenda dan prioritas pelayanan terhadap masyarakat untuk mengurangi stunting pada balita

Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam hal ini memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat untuk mengurangi angka stunting sudah memiliki agenda dan prioritas yang dilaksanakan hal ini sesuai dengan indikator kinerja dinas kesehatan kabupaten sragen 2022, diantaranya yaitu:

a. Kebutuhan edukasi melalui agenda dan prioritas pelayanan sosialisasi, kelas remaja, kelas calon pengantin, kelas ibu hamil, dan kelas balita

- 1) Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk membina dan memberikan edukasi, pengetahuan serta keterampilan pada kader kesehatan, dengan diadakannya sosialisasi

kepada kader ini dimaksudkan agar penyaluran informasi dan pengetahuan ke masyarakat dapat menjadi mudah, cepat dan lebih terarah mengingat kader kesehatan merupakan petugas pertama yang paling dekat dengan masyarakat. Sosialisasi ini biasanya diadakan setiap 3 bulan sekali, dimana dinas kesehatan menghadirkan pemateri baik dari dokter spesialis kandungan, dokter anak ataupun ahli gizi.

- 2) Kelas remaja merupakan suatu upaya untuk menangani permasalahan stunting yang dimulai sejak dini, dengan adanya kelas remaja ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan para remaja untuk menjaga kesehatan baik dari segi reproduksi, resiko kehamilan di umur terlalu muda atau tua, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, kekerasan seksual ataupun masalah keterbatasan akses informasi dan pelayanan kesehatan sehingga nantinya dapat ikut berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangannya. Di Kabupaten Sragen sendiri, kelas remaja dibentuk dari tingkat desa, yang beranggotakan remaja baik perempuan maupun laki-laki yang berusia 10 – 18 tahun. Selain dibentuk di tingkat desa. Ternyata kelas remaja juga dibentuk di area sekolah. Dimana dalam hal ini puskesmas bekerja sama dengan pihak sekolah ataupun pesantren yang ada di Kabupaten Sragen untuk mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada para siswanya.
- 3) Kelas Calon Pengantin merupakan kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, dimana pelaksana kegiatan tersebut yaitu pihak puskesmas yang bekerjasama dengan KUA. Adanya kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan keterampilan bagi calon pengantin dalam waktu relatif singkat tentang kesehatan diri dan pasangan terkait kesehatan reproduksi, kondisi/penyakit yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi, pelayanan kontrasepsi, kemudian terkait pernikahan yang ideal serta perencanaan kehamilan.
- 4) Kelas Ibu hamil
Kelas ibu hamil merupakan program yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan dan dilaksanakan oleh pihak puskesmas yang bekerjasama dengan bidan desa dan kader kesehatan PKK, posyandu tingkat Desa. Kelas ibu hamil ini bertujuan untuk mengedukasi ibu agar lebih memahami terkait kondisi kehamilan, asupan gizi pada ibu hamil, perawatan selama kehamilan, persalinan, hingga pasca persalinan serta perawatan bagi bayi baru lahir. Hal tersebut dimaksudkan agar para ibu dapat menjalani masa-masa kehamilan hingga persalinan secara lancar dengan dibekali pengetahuan dasar fase awal kehidupan bayi. Kelas ibu

hamil biasanya dilaksanakan selama satu bulan sekali di posyandu desa, tak hanya memberikan edukasi, pengetahuan dan keterampilan terkait pentingnya kesehatan saja, melainkan juga diberikan pemeriksaan kesehatan seperti cek tekanan darah, berat badan, cek HB, serta pemberian tablet tambah darah dan diajak untuk senam hamil bersama. Bagi ibu hamil dengan resti nantinya akan diberi penyuluhan dan pendampingan secara langsung oleh dokter spesialis kandungan yang biasanya dilaksanakan di Puskesmas setempat.

5) Kelas Ibu Balita

Kelas ibu balita merupakan kegiatan yang dicanangkan oleh dinas kesehatan kabupaten sragen dan dilaksanakan oleh puskesmas yang bekerjasama dengan bidan desa dan kader kesehatan desa, kelas ibu balita sering dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan posyandu sebulan satu bulan sekali. Dimana setiap ibu harus memiliki buku KIA yang digunakan sebagai alat pantau grafik pertumbuhan anak serta didalamnya terdapat arahan bagi ibu untuk memberikan pola asuh yang baik bagi balita. Dalam keberjalanannya biasanya setelah diadakan penimbangan dan pengukuran tinggi serta lingkaran kepala anak, ibu-ibu diarahkan untuk mengikuti materi dan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh bidan desa ataupun petugas puskesmas. Bagi balita dengan resti nantinya ibu balita akan diberi penyuluhan dan pendampingan secara langsung oleh dokter spesialis anak yang biasanya dilaksanakan di Puskesmas setempat. Namun dalam keberjalanannya masih saja ditemukan masyarakat yang bersikap acuh dan menganggap upaya tersebut tidak terlalu penting. Hal ini dilihat ketika masih adanya ibu balita yang enggan untuk datang ke posyandu dengan alasan rumah jauh, tidak ada waktu ataupun lebih mementingkan pekerjaan dirumah.

b. Kebutuhan pemulihan pangan dan gizi melalui Suplementasi tablet tambah darah bagi remaja dan ibu hamil, Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin/ Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan Pemberian makanan tambahan bagi balita yang normal ataupun kekurangan gizi

- 1) Di Kabupaten Sragen, pembagian tablet tambah darah diberikan melalui Kelas remaja baik di tingkat desa ataupun di tingkat sekolah. Hal ini dikarenakan anemia yang sering terjadi pada remaja tentu akan beresiko tinggi untuk mengalami anemia lagi pada masa kehamilannya kelak. Dengan demikian, bagi remaja tablet tambah darah merupakan sesuatu yang penting dan wajib untuk dikonsumsi setiap satu kali dalam seminggu. Selain remaja, tablet tambah darah juga diperlukan bagi ibu

hamil hal ini dimaksudkan agar ibu hamil tidak mengalami anemia sebab jika nantinya ibu hamil ini mengalami anemia tentu akan berdampak besar bagi janin serta kondisi kehamilan dan persalinannya. Terlebih jika ibu juga mengalami KEK (kekurangan energi kronis) maka akan berpotensi melahirkan bayi beresiko tinggi dengan berat badan rendah serta badan yang pendek atau sering disebut dengan stunting. Biasanya tablet tambah darah ini diberikan kepada ibu hamil ketika kelas ibu hamil, dalam hal ini setiap ibu hamil minimal mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 90 butir selama kehamilan.

2) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)

Dalam program pemberian makanan tambahan ini Dinas Kesehatan bekerjasama dengan pihak desa dan kader kesehatan PKK serta posyandu, dimana pihak desa juga ikut serta dalam memberikan dana desa untuk pemberian makanan tambahan serta pihak kader kesehatan yang berperan untuk memberikan makanan tambahan tersebut ke setiap ibu hamil beresiko tinggi. Adapun bentuk makanan tambahan yang diberikan pada ibu hamil yang mengalami KEK yakni berupa susu dan biscuit, hal tersebut dimaksudkan agar bantuan makanan dapat tepat sasaran ke ibu hamil saja tidak untuk dinikmati bersama keluarga.

3) Pemberian makanan tambahan bagi balita yang normal ataupun kekurangan gizi

Pemberian makanan tambahan ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi agar nantinya status gizi dan kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur anak tersebut dapat tercapai. Pada umumnya PMT terbagi menjadi dua jenis yaitu PMT penyuluhan dan PMT pemulihan. PMT penyuluhan merupakan sarana edukasi kepada orang tua balita tentang jenis makanan kudapan (snack) yang sehat dan bergizi untuk balita, serta untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi balita. Biasanya jenis makanan tambahan ini dimasak bersama-sama oleh kader kesehatan PKK yang sebelumnya sudah mendapatkan rekomendasi dari ahli gizi di puskesmas tentang berbagai macam makanan yang sesuai dengan gizi balita. Adapun makanan siap makan ini diberikan ketika posyandu berlangsung, jadi tidak hanya mengukur lingkaran kepala, tinggi dan berat badan balita saja. Adapun PMT Pemulihan yaitu makanan tambahan yang diberikan kepada balita yang kekurangan gizi atau berisiko stunting. Pemberian makanan ini dimaksudkan untuk memperbaiki gizi anak yang terlanjur buruk agar menjadi lebih baik lagi. Biasanya PMT yang diberikan dalam bentuk

susu dan biskuit yang berasal dari dinas kesehatan. Susu dan biskuit ini memiliki kandungan pada kalori sebagai makanan tambahan untuk mengejar berat badan balita.

c. Kebutuhan pemeriksaan kesehatan melalui Pemeriksaan bagi ibu hamil dan balita

Kebutuhan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan sehingga nantinya apabila terindikasi penyakit penyerta lain masyarakat dapat mengambil langkah untuk menanganinya. Adapun pemeriksaan ibu hamil biasanya dilaksanakan oleh bidan desa atau petugas KIA di puskesmas dimulai dari penimbangan berat badan, cek tekanan darah, cek Hb, suntik TT, cek lab ataupun USG. Dimana nantinya apabila ditemukan penyakit penyerta yang dialami ibu hamil, maka akan dirujuk oleh puskesmas ke rumah sakit rujukan. Adapun pemeriksaan pada balita dimulai dari balita yang sudah ditimbang berat badan, diukur lingkar kepala dan tinggi badan di posyandu setiap bulan. Dari hasil pengukuran tersebut apabila ditemukan balita yang terdeteksi stunting maka harus dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan validasi pengukuran oleh tenaga gizi atau bidan, setelah itu di cek di laboratorium dan akan diperiksa lebih lanjut oleh dokter. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat penyakit penyerta lainnya maka akan dirujuk kembali ke Rumah sakit umum daerah agar mendapat penanganan yang lebih lengkap mengingat di puskesmas sendiri masih kurang lengkap terkait peralatan kesehatan seperti alat USG, serta tidak adanya dokter spesialis baik kandungan ataupun anak.

d. Kebutuhan konseling dan pendampingan melalui konseling pojok gizi, door to door serta whatsapp group

Pojok gizi merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pihak puskesmas di kabupaten sragen yang bertujuan untuk pencegahan, penanggulangan, penyembuhan dan pemulihan terkait masalah gizi. Dalam keberjalanannya, pojok gizi di dampingi oleh tenaga kesehatan ahli gizi/nutritionist. Jika dilihat dari aspek penanggulangan stunting, pojok gizi ini berupaya untuk memberikan pendampingan dan edukasi terhadap ibu hamil, ibu menyusui dan ibu balita. Pada umumnya mereka menanyakan terkait bagaimana agar anak lahap makan, bagaimana menyusun menu yang baik dan variatif dan lain-lain, sehingga nantinya petugas dapat memberikan solusi dan arahan. Kemudian, via *door to door* merupakan langkah dari kader kesehatan bersama puskesmas di kabupaten sragen untuk memberikan materi pendampingan kepada ibu hamil atau balita yang berisiko tinggi. Selain dapat menyampaikan materi kepada ibu hamil atau ibu balita yang berisiko tinggi, via *door to door* ini menjadi upaya untuk memantau perkembangan kesehatan

dari kelompok sasaran tersebut, dimana dalam hal ini para kader kesehatan mendatangi rumah per rumah untuk memantau dan mengedukasi khususnya bagi ibu hamil dan balita resti terkait kesehatan mereka.

Adapun *whatsapp group*, merupakan langkah dari kader kesehatan dan bidan desa yang dapat memantau dan memberikan edukasi atau sesi konseling tanya jawab yang diajukan oleh ibu balita. Dengan melalui wa grup ini dirasa sangat memudahkan untuk saling memberikan informasi, apalagi di tengah masa covid-19 ini.

3. Kemampuan birokrasi untuk mengembangkan program-program pelayanan untuk mengurangi stunting pada balita

Dalam hal pengembangan program pelayanan untuk mengurangi angka stunting pada balita yang ada di Kabupaten Sragen, dinas kesehatan telah melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu orientasi untuk mendorong inovasi kesehatan serta peningkatan kerjasama dan kemitraan lintas sektor. Upaya ini sesuai dengan strategi dinas kesehatan yakni selalu memantapkan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan melalui nilai daya guna potensi seluruh sumber daya yang ada serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan kepada seluruh lintas sektoral untuk mewujudkan pembangunan kesehatan. Adapun bentuk pengembangan program pelayanan diwujudkan ke dalam :

a) Orientasi untuk Mendorong Inovasi Kesehatan

Dalam upaya memantapkan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan serta untuk melakukan promosi dan edukasi kesehatan utamanya terkait penanganan stunting pada balita, Dinas Kesehatan berupaya melatih dan mendorong para tenaga fasilitas kesehatan agar mampu untuk menciptakan inovasi unggulan di lingkungan kerja masing-masing. Dimana inovasi tersebut akan ditampilkan dalam Pameran Inovasi Kesehatan di Kabupaten Sragen yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Dalam keberjalanannya pameran ini diselenggarakan 1 kali setiap tahun. Pameran inovasi kesehatan sudah dilaksanakan sejak tahun 2019, 2020, dan 2021 yang diikuti oleh 25 Puskesmas, 11 Rumah sakit Negeri maupun swasta. Dengan adanya pameran inovasi kesehatan ini diharapkan mampu menjadi ajang bagi para tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang optimal, jadi selain meningkatkan kualitas SDM untuk menunjang pengembangan inovasi program kesehatan perlu juga diimbangi dengan inovasi program pelayanan kesehatan. Adapun salah satu inovasi terkait upaya penanganan stunting pada balita yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat utamanya tentang kebutuhan pemulihan pangan dan gizi yaitu inovasi Pembagian sepasang hewan mentok pada ibu hamil anemia dan KEK serta ibu balita gizi kurang yang berasal dari keluarga kurang mampu. Inovasi ini merupakan ide dari

Puskesmas Mondokan dengan *pilot project* di Desa Kedawung. Dengan adanya program ini dimaksudkan untuk meningkatkan gizi balita ataupun ibu hamil, dimana para ibu diharapkan mampu merawat sehingga mentog tetap lestari dan hasilnya bisa dimakan dan dijual baik dari segi telur ataupun dagingnya. Selain dirasa mampu meningkatkan perekonomian dan perbaikan gizi, mentog ini juga dirasa sangat mudah dalam perawatannya. Tak hanya itu, ternyata dengan diberikannya sepasang mentok ini nantinya akan menjadi cambuk bagi ibu hamil ataupun ibu balita agar tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Sehingga menjadikan pola pikir ibu menjadi mandiri. Meskipun terdapat manfaat yang besar, nyatanya penerapan inovasi ini masih terdapat kendala diantaranya yakni tidak bisa diterapkan di daerah lain karena memang kondisi dana dan kondisi lapangan yang tidak sama tiap daerah, serta adanya penolakan dari ibu yang beralasan tidak memiliki kandang dan kotorannya yang bau.

- b) Kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor meliputi Sebagai tempat penerapan kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa**
- Kerjasama yang dijalin Dinas Kesehatan bersama dengan mahasiswa ini selain menjadi ajang pengabdian masyarakat oleh mahasiswa, namun hal ini juga menjadi peluang besar bagi Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya untuk mendapatkan inovasi agar upaya dalam penanganan stunting menjadi lebih cepat dan optimal. Adapun salah satu perguruan tinggi yang pernah bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten sragen yaitu Telkom university. Mahasiswa Telkom ini sebelumnya berkolaborasi dengan PT Telkom yang kemudian ditantang untuk memberikan solusi bagi masyarakat desa melalui inovasi digital. Dalam kerjasama tersebut, Kampus Telkom berfokus permasalahan stunting, yang kemudian dipilihlah pada desa lokus stunting yaitu di Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. Adapun bentuk project yang dibuat oleh mahasiswa Telkom ini yakni berupa aplikasi My Bidan yang merupakan aplikasi berbasis web yang difungsikan untuk memberikan informasi, edukasi, pengetahuan, keterampilan serta pemantauan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu menjadi terobosan bagi masyarakat Kecamatan Mondokan untuk mengantisipasi terjadinya stunting sejak dini. Dalam keberjalanannya penggunaan aplikasi tersebut seluruh kader posyandu dan tenaga kesehatan serta ibu hamil dan ibu balita diberi username dan password, sehingga nantinya para ibu bisa mengetahui kondisi anak termasuk sehat atau stunting. Tak hanya itu, dalam aplikasi ini juga berisi tentang materi baik tulisan maupun video terkait apa itu stunting,

penyebab, dampak, serta cara pencegahannya. Meskipun aplikasi terkesan simple dan banyak manfaat, nyatanya aplikasi ini tidak bisa di implementasikan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Padahal setelah di Kecamatan Mondokan yang ditunjuk sebagai Pilot Project, aplikasi ini juga diterapkan di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Bandung. Hal tersebut dikarenakan memang anggaran dana yang tidak mencukupi untuk menjalin kerjasama dengan Telkom University jika inovasi aplikasi tersebut harus diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen, mengingat pada awal kerjasama hanya wilayah mondokan saja yang menjadi pilot project dan tentunya tidak dikenakan biaya.

Penutup

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Responsivitas Dinas Kesehatan dalam Upaya Mengurangi Angka Stunting Pada Balita sudah cukup responsive, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kemampuan Dinas Kesehatan mengenali kebutuhan masyarakat melalui survey mawas diri dan musyawarah masyarakat desa yang kemudian dapat dilihat jenis kebutuhan masyarakat diantaranya kebutuhan edukasi, kebutuhan pemulihan pangan dan gizi, kebutuhan pemeriksaan kesehatan serta kebutuhan konseling dan pendampingan.

Kemudian, Dinas kesehatan juga memiliki kemampuan untuk menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hal tersebut tertulis dalam indikator kinerja dinas kesehatan kabupaten sragen 2022 diantaranya yaitu dengan sosialisasi, kelas remaja, kelas calon pengantin, kelas ibu hamil dan kelas balita guna memenuhi kebutuhan edukasi. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan pemulihan pangan dan gizi dinas kesehatan memiliki prioritas untuk memberikan Suplementasi tablet tambah darah bagi remaja dan ibu hamil, Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin/ Kekurangan Energi Kronik (KEK) serta Pemberian makanan tambahan bagi balita yang normal ataupun kekurangan gizi. Adapun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan konseling serta pendampingan, dinas kesehatan memiliki prioritas untuk memberikan pemeriksaan rutin pada ibu hamil dan balita serta adanya konseling dan pendampingan baik melalui pojok gizi, *door to door* ataupun *whatsapp group*.

Tak hanya itu, dinas kesehatan kabupaten sragen juga mampu untuk mengembangkan program pelayanan, adapun beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu orientasi untuk mendorong inovasi kesehatan serta peningkatan kerjasama dan kemitraan lintas sektor. Adapun wujud pengembangan program tersebut yakni adanya pameran inovasi kesehatan yang dilaksanakan setiap tahun sekali dimana menghasilkan inovasi salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemulihan pangan dan gizi yaitu pemberian sepasang mentok kepada ibu hamil KEK dan ibu

balita gizi kurang. Selanjutnya, yaitu kerjasama dan kemitraan lintas sektoral yang mampu menggandeng perguruan tinggi Telkom university untuk memenuhi kebutuhan edukasi melalui aplikasi My bidan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya Dinas Kesehatan untuk mengurangi angka stunting pada balita, diantaranya yaitu masih ditemukannya sikap acuh tak acuh dari masyarakat, kurang lengkapnya sarana prasarana kesehatan di puskesmas seperti USG dan tidak adanya dokter spesialis kandungan ataupun anak serta tidak maksimalnya anggaran sehingga dari dinas kesehatan tidak mampu untuk mengaplikasikan program inovasi tersebut ke seluruh wilayah di Kabupaten Sragen dan hanya mampu dijalankan di wilayah Mondokan saja, sebagai *pilot project* dari inovasi tersebut. Oleh karena itu, penulis memiliki saran untuk :

1. Hendaknya Dinas Kesehatan lebih menggiatkan lagi agar para pelaksana program dalam hal ini kader kesehatan, posyandu ataupun puskesmas untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat agar lebih berantusias dalam menjaga kesehatan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi ajakan dan edukasi melalui pamflet yang disebarluaskan melalui media sosial seperti whatsapp, instagram atau facebook.
2. Hendaknya Dinas Kesehatan meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil ataupun balita, utamanya di tingkat puskesmas seperti tersedianya dokter spesialis baik dokter kandungan ataupun dokter anak, kemudian tersedianya alat USG yang lebih lengkap.
3. Dinas kesehatan perlu meningkatkan lagi terkait pengembangan inovasi yang sudah diselenggarakan, yakni dengan diperkuatnya anggaran dan regulasi sebagai dasar hukum agar inovasi dari berbagai instansi kesehatan dalam hal ini puskesmas dan rumah sakit dapat diterapkan di berbagai wilayah di Kabupaten Sragen tidak hanya di desa *pilot project* saja, sehingga upaya penurunan angka stunting pada balita dapat terwujud.

Referensi

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. 2019. *Laporan Pelaksanaan Integrasi Susenas Maret 2019 dan SSGBI tahun 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Dwiyanto A. 2006. *Mewujudkan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen 2022

- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi-Edisi III Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*. Jakarta: Kedepuyan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Momna Yousaf, et al. (2015). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan. *Elsevier Inc. Government Information Quarterly*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 30 tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Sragen.
- Setiawan B. (2018). *Faktor-faktor Penyebab Stunting Pada Anak Usia Dini*. Bekasi: Yayasan Rumah Kreatif.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sutiono A., dkk. (2011). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Weldu F.A. (2016). Assessment of Responsiveness and Transparency: The case of Mekelle Municipality. *Journal of Civil & Legal Sciences*. 5.